

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi. Prenada Media.
- Agustina, Rosa. (2003). Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Arba, H. M. (2021). Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jakarta. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Danialsyah, H., Lubis, M. R., & Siregar, G. (2023). Hukum Acara Perdata-Teori dan Praktek. Medan. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Fuady, Munir. (2017). Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer). Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Irwansyah. (2021). Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi). Yogyakarta. Mirra Buana Media.
- Masidin, (2023). Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim. Prenada Media.
- Muarif, M. Fathoni dan Shally Lydia Nainggolan. (2019). Infrastruktur Untuk Negeri. Jakarta. PT. Mahesa Kusumat Sakti.
- Muwahid. (2020). Hukum Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Surabaya. Duta Media Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta. Prenadamedia.
- Saleh, I. A. (2014). Konsep Pengawasan Kehakiman. Malang. Setara Press.

Sutedi, A. (2020). *Implementasi prinsip kepentingan umum di dalam pengadaan tanah untuk pembangunan*. Jakarta. Sinar Grafika (Bumi Aksara). Suadi, Amran. (2022). *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta. Kencana.

Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung CV. Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Termasuk Lembaran-Negara No. 104 tahun 1960).

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2324).

Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648), sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672).

C. Sumber Jurnal

Afriana, A., Rahmawati, E., & Mantili, R. (2022). Batasan asas hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1).

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1).
- Busthami, D. (2018). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4).
- Djanggih, H., & Salle, S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2).
- Erlangga Saputra, Rohandi Yusup. Tinjauan Yuridis Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Tol (Jorr) Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012. *Isu-isu Krusial Dalam Hukum Keluarga*.
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(1).
- Harjanti, W. (2011). Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia. *Risalah Hukum*.
- Kaeng, B. I. (2022). Kebebasan dan Pedoman Hakim dalam Penerapan Putusan Pengadilan . *Lex Administratum* , 10(02).
- Kurniawati, S. (2018). Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. In *Seminar Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2018 (SATIESP 2018)*.

- Kamalia, N. S., & SHI, M. (2019). Asas Pasif dan Aktif Hakim Perdata serta Relevansinya dalam Konsep Kebenaran Formal. Retrieved from Pengadilan Agama Rumbia: <https://parumbia.go.id>.
- Muklis, M. (2023). Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(1).
- Nafi, M., & Solehah, C. M. (2020). Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1).
- Qotrunnada, Z. S., Saputra, R. A., Nugroho, F. T., & Lestari, A. Y. (2025). Tanggungjawab Hukum Perdata Dokter Gigi Dalam Menjalankan Praktik Akibat Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Sitepu, N. K. W., Sunarmi, S., & Muhaldi, M. (2025). Tanggung Jawab Penjual Saham Akibat Beralihnya Saham Tanpa Persetujuan Pemegang Saham (Studi Putusan Nomor 82 K/PDT/2020). *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(1).
- Subiyanto, A. E. (2016). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4).
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02).
- Suryoutomo, M., Mariyam, S., & Satria, A. P. (2022). Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).

- Thenata, P. D. J., Susanto, R. J., & Kurniawati, J. O. (2025). Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pertanahan Studi Perbandingan antara Indonesia dan Prancis. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1).
- Wibowo, S. N., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2021). Kepastian hukum ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol cisumdawu. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2).
- Yusrizal, M. (2017). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).